

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM
MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI DESA
SIMANERE BOTOMUZOI KECAMATAN BOTOMUZOI
KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH :

BENIH DAMAI SEJAHTERA HALAWA

218520035



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/26

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/26

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM
MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI DESA
SIMANERE BOTOMUZOI KECAMATAN BOTOMUZOI
KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH :

BENIH DAMAI SEJAHTERA HALAWA

218520035

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/26

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan
Pertumbuhan Penduduk Di Desa Simanaere Botomuzoi
Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias

Nama : Benih Damai Sejahtera Halawa

NPM : 218520035

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Drs. Bahrum Jamil MAP

Mengetahui

Dekan



Dr. Walid Musthafa, S.Sos, M.IP

Ka. Prodi Administrasi Publik



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Tanggal Lulus : 31 Juli 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/26

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 September 2025



Benih Damai Sejahtera Halawa

218520035

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benih Dami Sejahtera Halawa

NPM : 218520035

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

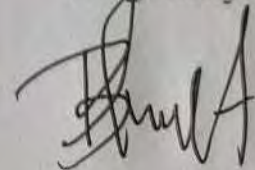
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Desa Simanaere Botomuzoi Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada Tanggal 24 September 2025

Yang menyatakan



Benih Damai Sejahtera Halawa

218520035

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

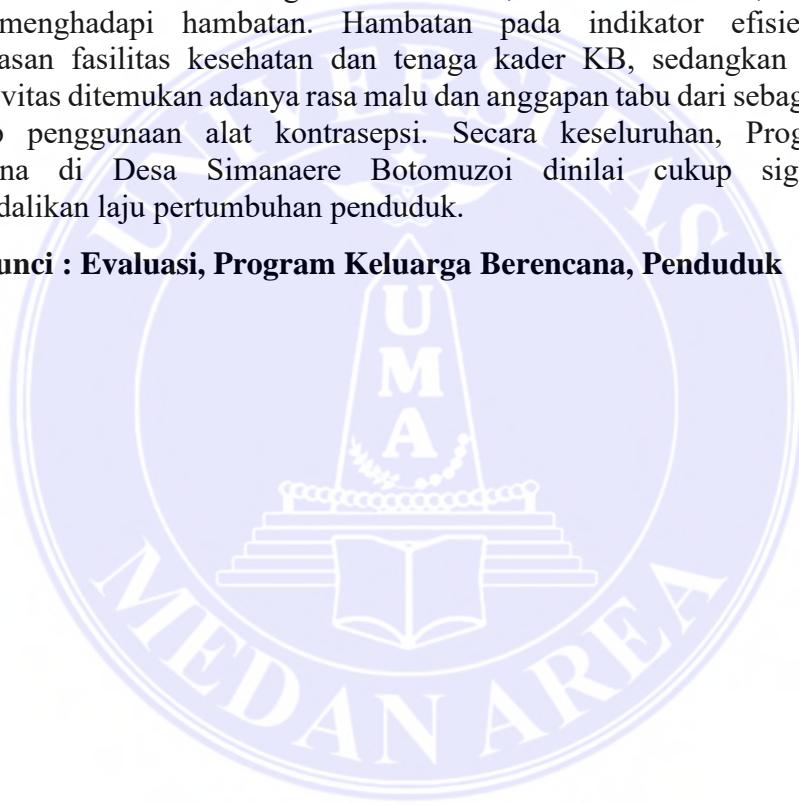
Document Accepted 21/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Keluarga Berencana dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam indikator dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator efektivitas, kecukupan, pemerataan dan ketepatan telah terlaksana dengan baik. Namun, indikator efisiensi, dan responsivitas masih menghadapi hambatan. Hambatan pada indikator efisiensi mencakup keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga kader KB, sedangkan pada indikator responsivitas ditemukan adanya rasa malu dan anggapan tabu dari sebagian masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Secara keseluruhan, Program Keluarga Berencana di Desa Simanaere Botomuzoi dinilai cukup signifikan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

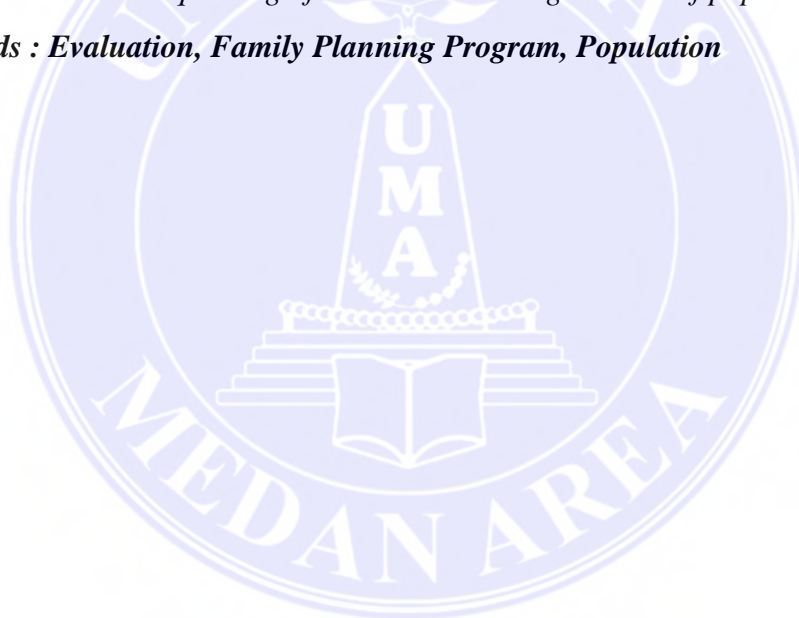
Kata Kunci : Evaluasi, Program Keluarga Berencana, Penduduk



ABSTRACT

This study aims to evaluate the Family Planning Program in controlling population growth in Simanaere Botomuzoi Village, Botomuzoi District, Nias Regency. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The evaluation is based on six indicators by William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results of the study indicate that the indicators of effectiveness, adequacy, equity, and appropriateness have been well implemented. However, the indicators of efficiency and responsiveness still face obstacles. Barriers to efficiency include limited healthcare facilities and a shortage of family planning field workers, while barriers to responsiveness involve feelings of shame and the perception of taboo among some community members regarding the use of contraceptives. Overall, the Family Planning Program in Simanaere Botomuzoi Village is considered quite significant in controlling the rate of population growth.

Keywords : Evaluation, Family Planning Program, Population



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Benih Damai Sejahtera Halawa
Tempat dan Tanggal Lahir : Simanaere, 06 September 2001
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Walomburu'u, Desa Simanaere Botomuzoi,
Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias
Status : Belum Menikah
Email : benihdamaisejahterahalawa@gmail.com
No. Hanpdhone : 085359413642

Latar Belakang Pendidikan

2008 – 2014 : SD Negeri 071011 Orahua Muzoi
2014 – 2017 : SMP Negeri 2 Botomuzoi
2017 - 2020 : SMA Negeri 1 Btomuzoi
2021 - 2025 : S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Drs. Bahrum Jamil MAP selaku Dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Otoni Halawa selaku Kepala Desa Simanaere Botomuzoi beserta perangkat desa dan tenaga pelayanan KB yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang sangat membantu dalam penelitian ini.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup ini. Atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah terhenti menjadi cahaya penuntun di setiap langkah perjalanan penulis. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara kandung tercinta Benih Berkat Jaya Halawa, Etik Lestari Kristiani Halawa, Niatman Halawa, dan Gustika Dwi Jayanti Halawa serta kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan menjadi tempat pulang yang penuh

kehangatan, penulis merasa sangat beruntung dikelilingi oleh cinta yang begitu tulus. Penulis juga berterimakasih kepada Novipriani Mendrofa yang selalu menemani dari awal hingga saat ini yang telah banyak membantu dan selalu ada disaat senang maupun sedih. Kepada rekan seperjuangan di kampus Maychel, Elsa, Zulva, Pedima, Teguh dan teman-teman AP 21 yang memberikan semangat, kebersamaan, dan dukungan moral selama penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan kepada diri sendiri yang telah berjuang sekuat tenaga, bertahan dalam setiap kesulitan, dan tetap melangkah meskipun sering merasa lelah, skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha akademik, melainkan juga bukti dari keberanian untuk tidak menyerah dan terus percaya pada kemampuan diri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang membutuhkannya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 06 Maret 2025

Benih Damai Sejahtera Halawa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Secara Teoritis	7
1.4.2. Secara Praktis.....	7
 II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1. Kebijakan Publik.....	8
2.2. Evaluasi Kebijakan Publik.....	11
2.3. Tujuan Evaluasi	13
2.4. Program Keluarga Berencana	14
2.5. Tujuan Program Keluarga Berencana	15
2.6. Sasaran Program Keluarga Berencana.....	16
2.7. Manfaat Program Keluarga Berencana	17
2.8. Pertumbuhan Penduduk	18
2.9. Penelitian Terdahulu	18
2.10. Kerangka Berpikir.....	23

III METODE PENELITIAN 24

3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
3.3. Informan Penelitian.....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5. Teknik Analisa Data	28

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 31

4.1. Hasil Penelitian.....31

4.1.1. Gambaran Umum Desa Simanaere Botomuzoi	31
4.1.2. Visi Desa Desa Simanaere Botomuzoi	32
4.1.3. Misi Desa Desa Simanaere Botomuzoi	33
4.1.4. Struktur Organisasi Desa Simanaere Botomuzoi.....	34
4.1.5. Program Keluarga Berencana Di Desa Simanaere Botomuzoi	35

4.2. Pembahasan.....39

4.2.1. Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias	39
4.2.2. Kendala yang dialami oleh Program Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias	64

V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. KESIMPULAN	68
5.2. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian terdahulu.....	19
Tabel 2. Waktu Penelitian	25
Tabel 3. Pengguna KB aktif Desa Simanaere Botomuzoi.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk	5
Gambar 2. Kerangka Berpikir	23
Gambar 3. Kantor Kepala Desa Simanaere Botomuzoi	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara	76
Lampiran II. Dokumentasi	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, tekanan pada sumber daya alam, lingkungan, dan layanan publik semakin besar. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan proyeksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai dinamika populasi global, pertumbuhan populasi alami Indonesia hampir mendekati sebesar 4 juta jiwa per tahun. Dengan peningkatan pertumbuhan saat ini sebesar 1,3% per tahunnya, dapat diperkirakan bahwa populasi Indonesia akan mencapai sekitar 470 juta jiwa pada tahun 2060. Hingga tahun 2022, populasi Indonesia tercatat sebesar 275.770.000 jiwa, meningkat 1,13% dari angka tahun sebelumnya sebesar 272.680.000 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dalam mengatasi permasalahan penduduk di Indonesia, program KB (Keluarga Berencana) menjadi fondasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam mengatasi peningkatan populasi penduduk. Dalam Kemenkes, (2023) KB (Keluarga Berencana) menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pengendalian jumlah penduduk merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan nasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan membentuk Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa “Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Dari tujuan yang dimaksud perencanaan tersebut bukan bermakna untuk membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak waktu kelahiran anak.

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) juga diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, serta Sistem Informasi Keluarga. Pembangunan dan pertumbuhan keluarga adalah upaya yang direncanakan untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang stabil serta

meningkatkan kualitas penduduk dalam semua aspek kehidupan. Pembangunan keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang memiliki kualitas baik dan tinggal dalam lingkungan yang sehat. Di Indonesia tingginya laju pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh dalam masalah pembangunan. Dari sudut pandang kebijakan pembangunan, jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permasalahan pembangunan suatu daerah. Data populasi penduduk memiliki peran yang signifikan dalam proses perencanaan pembangunan. Semakin banyaknya informasi penduduk yang tersedia tersedia maka akan semakin memudahkan perencanaan pembangunan (Larasati et al., 2019)

Kebijakan Program Keluarga Berencana diakui telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di hampir semua negara. Kini, program keluarga berencana diyakini menjadi instrumen penting dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) di 2030. Program ini mengajak pasangan atau keluarga untuk memiliki anak tidak lebih dari dua orang, dengan kata lain, program ini fokus pada pengendalian angka kelahiran atau kehamilan pada setiap keluarga. Untuk mewujudkan suksesnya program keluarga berencana, masyarakat sangat disarankan untuk memakai alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi ini bertujuan mencegah atau menunda kehamilan.

Banyak sekali manfaat dari program keluarga berencana jika dapat terlaksana dengan baik salah satunya bagi pasangan suami istri antara lain menekan kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi risiko aborsi, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, menjaga kesehatan mental keluarga, menjaga kestabilan ekonomi keluarga, dan

memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pasangan untuk mengembangkan potensi diri misalnya melanjutkan studi, meniti karir dan mengembangkan usaha sebelum mendapatkan keluarga.

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan urutan keempat kepadatan penduduk setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dan terbanyak di Pulau Sumatera. Menurut data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sebanyak 15,47 juta jiwa. Ada beberapa Kabupaten/Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, salah satunya adalah Kabupaten Nias.

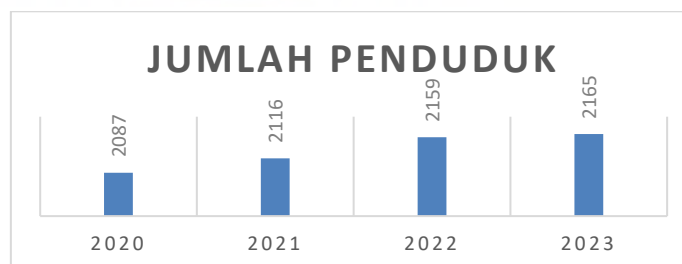
Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Nias, provinsi Sumatera Utara, Indonesia dengan memiliki luas total area 853,44 Km², terdiri dari 10 kecamatan dan 170 desa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias, pada tahun 2022 jumlah penduduk di kabupaten Nias berjumlah 149.249 jiwa hingga pada tahun 2023 mencapai 153.658 jiwa. Dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Nias meningkat 2,95% dalam kurun waktu 1 tahun.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali merupakan tantangan serius dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya seperti Kabupaten Nias. Pemerintah memandang program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya strategis untuk mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala seperti

kurangnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas, dan resistensi dari sebagian masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi (Dina Purnawati, dkk 2024).

Di tingkat daerah, pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Nias didasarkan pada Peraturan Bupati Nias Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias. Peraturan ini mengatur struktur kelembagaan dan tugas pokok dinas yang bertanggung jawab dalam pengendalian populasi, termasuk program KB. Dinas tersebut memiliki fungsi utama dalam merancang kebijakan, menyosialisasikan program keluarga berencana, serta memantau pelaksanaannya di seluruh kecamatan dan desa, termasuk di Desa Simanaere, Kecamatan Botomuzoi. Desa Simanaere merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Botomuzoi yang menghadapi tantangan serupa dengan daerah lain di Kabupaten Nias terkait peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan profil Desa Simanaere Botomuzoi menyatakan bahwa jumlah pertumbuhan penduduk dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1 : Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Desa Simanaere



Pelaksanaan program Keluarga Berencana di Desa Simanaere sangat relevan dalam mengurangi risiko pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Evaluasi terhadap pelaksanaan program ini menjadi penting untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat, penggunaan alat kontrasepsi, serta sejauh mana efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat. Selain itu, evaluasi ini juga dapat mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan program keluarga berencana di desa tersebut.

Permasalahan di atas membuat penulis tertarik dalam membahas lebih dalam lagi mengenai program Keluarga Berencana di Desa Simanaere Botomuzoi. Dengan demikian penulis akan melakukan pengevaluasian untuk meningkatkan program tersebut, dengan demikian penulis mengambil judul **“Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana mengevaluasi program keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias?

2. Apa saja kendala yang dialami program keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan di bahas, tujuan yang ingin di capai adalah

1. Untuk mengevaluasi program keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami program keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara teoritis

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan.
- b. Bagi peneliti dapat pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam Evaluasi Program Keluarga Berencana di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias

1.4.2. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Program Kampung KB di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Dalam bahasa Inggris, kebijakan dikenal dengan istilah policy. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai sekumpulan konsep dan asas yang menjadi pedoman utama dalam merancang dan melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau tindakan, baik di pemerintahan maupun organisasi. Kebijakan juga berfungsi sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan pedoman dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2007:15), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya.” Namun, definisi ini banyak pihak yang menganggap bahwa terlalu luas untuk dapat dimengertui dikarenakan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kebijakan publik. Sementara itu, Carl J. Federick dalam pandangan yang diambil dari Agustino (2008:7) menjelaskan kebijakan sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Dalam proses tersebut, terdapat berbagai tantangan dan peluang yang dapat memengaruhi implementasi usulan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukan hanya tentang rencana atau ide, tetapi juga tentang tindakan nyata yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Kebijakan publik di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) No. 4 Tahun 2007. Peraturan ini memberikan pedoman umum terkait formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik di lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Kebijakan, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah atau organisasi, yang bersifat mengikat dan harus diikuti oleh seluruh pihak terkait.

Menurut Dunn dalam Pasolong (2010:39), mengatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Dye, George C. Edwards III dalam Suwitri (2008:9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Menurut William Dunn dalam Wibawa (2011:9), kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap penting:

1. Penyusunan Agenda

Tahap ini merupakan langkah awal yang strategis dalam proses kebijakan publik. Pada tahap ini, berbagai isu dipertarungkan untuk mendapatkan perhatian dan prioritas di dalam agenda publik. Isu yang berhasil masuk ke

dalam agenda publik akan mendapatkan alokasi sumber daya lebih besar dibandingkan isu lainnya. Oleh karena itu, sangat penting menentukan isu publik yang relevan untuk diangkat menjadi bagian dari agenda pemerintah. Isu kebijakan, atau sering disebut masalah kebijakan, merupakan hasil perdebatan terkait perumusan, rincian, dan penilaian masalah tertentu. Namun, tidak semua isu bisa diangkat menjadi agenda kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Setelah masuk ke agenda, para pembuat kebijakan akan merumuskan masalah tersebut dan mencari solusi terbaik. Solusi yang dipilih berasal dari berbagai alternatif kebijakan yang telah dipertimbangkan.

3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Adopsi kebijakan adalah proses resmi di mana salah satu alternatif kebijakan yang dipilih diresmikan oleh pemerintah. Tahap ini bersifat terbuka, dan masyarakat harus segera diberitahu melalui media atau dokumen resmi, seperti lembaran negara. Legitimasi bertujuan untuk memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Apabila proses legitimasi diatur berdasarkan kedaulatan rakyat, masyarakat akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi melibatkan penerapan kebijakan oleh lembaga terkait untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tanpa implementasi, kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap substansi, implementasi, dan dampak kebijakan. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di tahap akhir tetapi juga selama keseluruhan proses kebijakan, termasuk perumusan masalah, pelaksanaan program, dan dampaknya.

Menurut Dunn, kebijakan publik melibatkan berbagai pilihan kolektif yang saling berhubungan dan memerlukan keputusan untuk bertindak. Menurut Indihano (2009:4) juga menambahkan bahwa kebijakan publik secara substansif mencakup berbagai kegiatan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan masalah publik.

2.2. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi secara umum dipahami sebagai penaksiran (appraisal), pemberian nilai (rating), atau penilaian (assessment). Secara khusus, evaluasi berkaitan dengan pengumpulan informasi mengenai manfaat atau nilai dari hasil kebijakan (Dunn, 2003). Hasil kebijakan dianggap bernilai jika berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan atau program dapat dikatakan memiliki kinerja yang signifikan apabila masalah kebijakan berhasil diidentifikasi dan diatasi dengan baik.

Evaluasi sering disamakan dengan pemantauan, meskipun keduanya memiliki fokus berbeda. Pemantauan lebih menekankan pada pengumpulan fakta mengenai pelaksanaan kebijakan, sedangkan evaluasi bertujuan menciptakan penilaian nilai untuk mengukur kinerja kebijakan (Dunn, 2003). Pemantauan berfokus pada

pertanyaan seperti “apa yang terjadi, bagaimana, dan mengapa?”, sementara evaluasi menjawab pertanyaan “apa perubahan yang telah terjadi?”.

Setiap proses evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu sebagai panduan bagi analisis kebijakan, yaitu:

1. Bertujuan menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluator bersikap objektif dan tidak terlibat langsung dengan pembuat, pelaksana, atau penerima manfaat kebijakan.
3. Metodologi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Dilakukan dalam suasana kerja yang kondusif, tanpa permusuhan atau konflik.
5. Mencakup keseluruhan proses kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga dampak kebijakan (Nugroho, 2009).

Dunn (2003) mengidentifikasi beberapa karakteristik evaluasi kebijakan yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya:

1. Fokus nilai: Evaluasi bertujuan mengukur manfaat sosial dari kebijakan. Karena tujuan dan sasaran kebijakan selalu dapat dipertanyakan, evaluasi juga menyentuh aspek penilaian terhadap ketepatan tujuan tersebut.
2. Interdependensi fakta dan nilai: Evaluasi tidak hanya bergantung pada fakta, tetapi juga pada nilai-nilai yang mendasarinya. Agar kebijakan dianggap berhasil, diperlukan bukti bahwa kebijakan tersebut memang merupakan hasil dari tindakan nyata yang diambil untuk memecahkan masalah tertentu.
3. Orientasi masa kini dan masa lalu: Berbeda dari advokasi yang berorientasi ke masa depan, evaluasi fokus pada hasil yang telah dicapai saat ini dan di masa lalu, sehingga bersifat retrospektif.

4. Dualitas nilai: Nilai dalam evaluasi berfungsi sebagai tujuan dan sarana. Dalam konteks ini, evaluasi mirip dengan rekomendasi karena menyentuh aspek nilai intrinsik maupun ekstrinsik, yang diatur dalam hierarki tertentu sesuai kepentingan dan sasaran kebijakan.

Menurut Dunn (2003), terdapat beberapa kriteria utama untuk mengevaluasi kebijakan:

1. Efektivitas: Apakah tujuan kebijakan telah tercapai.
2. Efisiensi: Berapa banyak upaya atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan: Apakah hasil yang dicapai mampu menyelesaikan masalah.
4. Pemerataan: Apakah manfaat dan biaya kebijakan didistribusikan secara adil di berbagai kelompok masyarakat.
5. Responsivitas: Apakah hasil kebijakan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat.
6. Ketepatan: Apakah hasil kebijakan relevan dan bermanfaat dalam konteks yang dihadapi.

Evaluasi berperan sebagai alat untuk menilai nilai kebijakan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Evaluasi membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Bahkan ketika mengevaluasi aspek yang sulit diukur, penilaian tetap harus didasarkan pada data yang diperoleh secara ketat dan objektif agar hasilnya valid dan dapat diandalkan.

2.3. Tujuan Evaluasi

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik berhasil diterapkan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk mengukur apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Menurut Nugroho (2014), tujuan evaluasi bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami sejauh mana kebijakan berhasil mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pandangan James Anderson, evaluasi kebijakan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis:

1. Fungsi strategis: Evaluasi dianggap sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari kebijakan itu sendiri.
2. Fokus pada kinerja: Evaluasi menitikberatkan pada seberapa baik kebijakan dijalankan, dengan mengutamakan transparansi dan efisiensi selama proses implementasinya.
3. Evaluasi sistematis: Pendekatan ini berupaya menjawab pertanyaan terkait kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, alokasi biaya, manfaat yang diperoleh, dan pihak yang mendapatkan manfaat tersebut.
4. Pemahaman menyeluruh: Evaluasi bertujuan memberikan wawasan tentang kebijakan, mencakup bagaimana kebijakan dilaksanakan dan dampak yang dihasilkan.

2.4. Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan kuantitas dan kualitas penduduk. Sebagai bagian dari kebijakan publik, program ini menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup, baik dalam hal daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan. Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Pengendalian tersebut dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu mengatur angka kelahiran, menurunkan tingkat kematian, serta mengarahkan mobilitas penduduk agar selaras dengan kondisi lingkungan dan pembangunan.

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak antar kelahiran, dan usia ideal untuk melahirkan, serta mengelola kehamilan. Hal ini dilakukan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan berdasarkan hak reproduksi guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan melibatkan penggunaan metode, alat, dan obat kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi mencakup pemberian atau pemasangan alat kontrasepsi, serta berbagai tindakan terkait yang diberikan kepada calon peserta dan peserta KB di fasilitas pelayanan KB. Pelaksanaan layanan ini harus sesuai dengan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama, norma budaya, etika, dan kesehatan (Kemenkes RI, 2014).

2.5. Tujuan Program Keluarga Berencana

Menurut Marmi tahun 2016, program Keluarga Berencana (KB) memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Tujuan Umum

Mewujudkan visi dan misi program KB dengan membangun dan memperkuat dasar yang kuat untuk pelaksanaan program di masa depan, sehingga dapat mencapai tujuan akhir berupa keluarga berkualitas.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengaturan kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia.
- b. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Program KB diharapkan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari keluarga. Dengan jumlah anak yang terkendali, orang tua dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, serta pendidikan bagi anak-anak mereka.

2.6. Sasaran Program Keluarga Berencana

Sasaran program Keluarga Berencana (KB) menurut Marmi pada tahun 2016 terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sasaran Langsung

Ditujukan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan tujuan menurunkan angka kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan.

2. Sasaran Tidak Langsung

Meliputi para pelaksana dan pengelola program KB, dengan fokus menurunkan angka kelahiran hidup melalui penerapan kebijakan kependudukan terpadu.

Tujuan akhirnya adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera.

2.7. Manfaat Program Keluarga Berencana (KB)

Menurut Marmi pada tahun 2016, program Keluarga Berencana (KB) memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

1. Manfaat bagi Ibu

Program KB membantu mengatur jumlah dan jarak antar kelahiran, sehingga dapat menjaga kesehatan ibu dengan mencegah kehamilan berulang dalam waktu yang berdekatan.

2. Manfaat bagi Anak-Anak

Dengan adanya pengaturan kelahiran, anak-anak dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun psikis.

3. Manfaat bagi Suami

Program KB juga berdampak positif bagi suami, karena dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, berkurangnya rasa cemas membuat suami memiliki lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga.

2.8. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk adalah individu yang tinggal di suatu wilayah geografis, seperti Indonesia, selama enam bulan atau lebih, atau yang tinggal kurang dari enam bulan namun memiliki niat untuk menetap. Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009, penduduk mencakup warga negara Indonesia dan warga asing yang menetap di Indonesia. Kependudukan mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, serta kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan masyarakat di suatu wilayah.

Beberapa pandangan ekstrem menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menjadi penyebab utama masalah ekonomi dan kerawanan sosial. Jika tidak dikendalikan, pertumbuhan ini dapat memicu krisis besar yang berdampak buruk bagi umat manusia, seperti peningkatan kemiskinan, menurunnya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial lainnya (Todaro, 1995). Namun, Kuznets (dalam Munir, 1986) berpendapat bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk justru dapat mendorong perubahan ekonomi dan meningkatkan kemampuan manusia untuk mengelola lingkungannya, yang kemudian memicu perubahan kelembagaan. Boserup menambahkan bahwa pertumbuhan penduduk akan mendorong para petani bekerja lebih keras dan mengelola lahan secara lebih intensif.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang di ambil oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dan sumber referensi yang berhubungan dengan judul penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama peneliti	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Evaluasi Kampung Berencana Program Keluarga Di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, (Taufik Hidayat, dkk tahun 2021)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana secara umum belum berjalan dengan baik hal tersebut terlihat dari indikator input, proses dan output yang tidak tercapai seperti peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Keluarga Berencana yang minim dilakukan, peyediaan sarana dan prasaran pendukung yang masih terbatas, minimnya dukungan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat pada pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pelayanan kependudukan yang tidak berjalan serta capaian peserta Keluarga Berencana aktif, partisipasi kelompok kegiatan serta pendataan	Perbedaan penelitian terletak dalam penelitiannya memilih lokus di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

			keluarga yang tidak mencapai target yang ditetapkan, hanya pada kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana yang dapat berjalan dengan baik.	
2	Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Dinas Sosial, Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, (Giska Yulia & Nora Eka Putri tahun 2024)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Program KB di Kota Padang Panjang telah cukup berhasil dalam mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, hal ini didukung oleh beberapa faktor pendukung. Namun dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana tersebut masih ditemukan juga beberapa faktor penghambat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terus-menerus serta evaluasi efektivitasnya, sambil terus berupaya menjaga dan meningkatkan program agar capaiannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya.	Perbedaan penelitian terletak pada peran dinas pengendalian penduduk dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Padang Panjang.

3	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Tawangga Kabupaten Konawe Tahun 2024, (Dina Purnawati, dkk 2024)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian target peserta KB di Puskesmas Tawangga belum sepenuhnya optimal, meskipun ada peningkatan jumlah akseptor KB setiap tahunnya. Efektivitas metode kontrasepsi yang digunakan bervariasi, dengan metode jangka panjang lebih banyak diminati. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas, dan resistensi dari sebagian masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi.	Perbedaan penelitian terletak pada evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana dan penelitiannya memilih lokus di Puskesmas Tawangga Kabupaten Konawe.
4	Evaluasi Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kalimantan Selatan, (Biworo, dkk pada 2022)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian didapatkan semua variabel dalam indeks kepuasan masyarakat pada program KKBPK yang telah dijalankan berkategori puas. Hasil pada variabel input didapatkan bahwa SDM belum	Penelitian ini lebih menekankan pada keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di

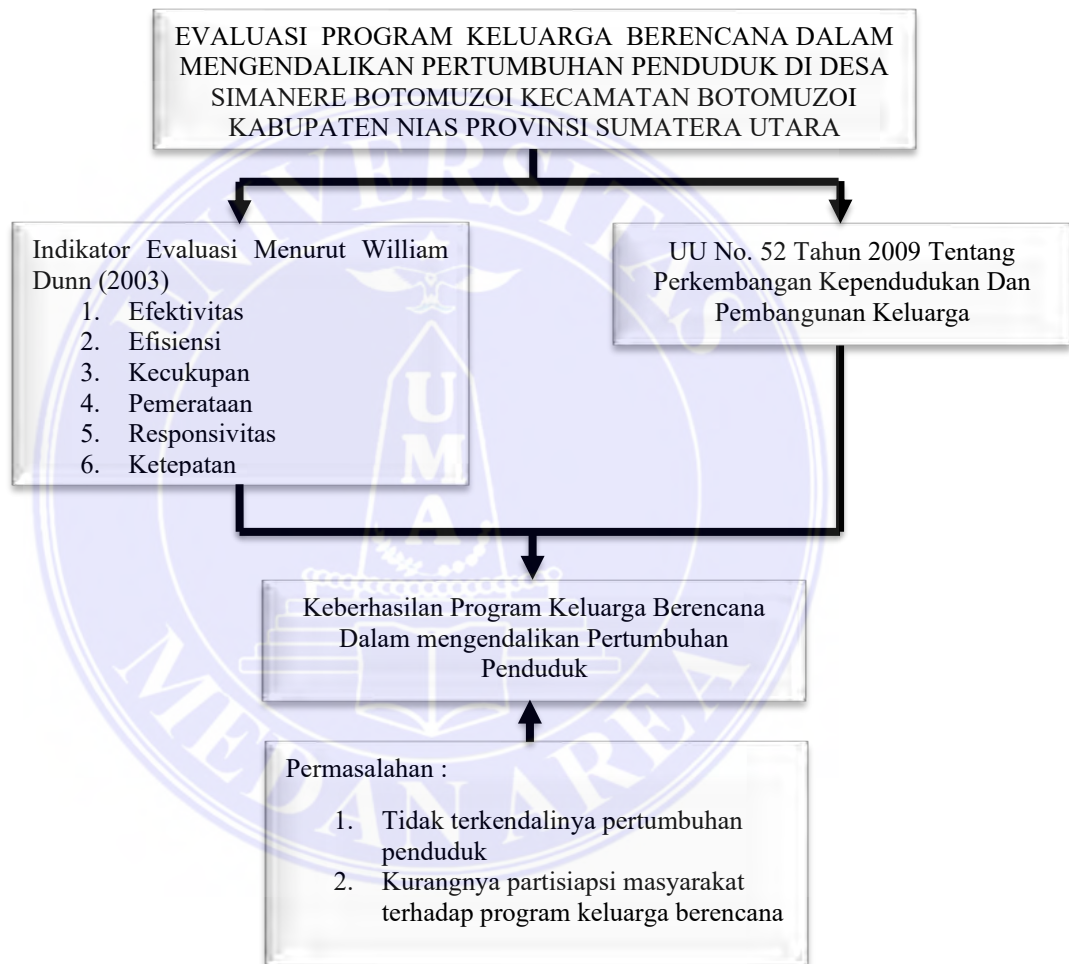
			mencukupi, pendistribusian dana belum cukup, serta sarana dan prasarana mencukupi.	Kalimantan Selatan
5	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kampung Kb Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, (Yanuar Sukmahandika 2024)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Kampung KB Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul sudah terlaksana dengan baik, namun dalam penerapannya masih belum maksimal dan terdapat beberapa kekurangan. Seperti Terbatasnya anggaran dari pemerintah, masih ada beberapa masyarakat yang belum terlayani program KB,.	Perbedaan pada penelitian dapat dilihat pada pelaksanaan program kampung KB di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

2.10. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema sederhana yang dibuat kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat

diketahui secara jelas dan terarah (Cholid Nurbuko, 2010). Adapun kerangka berpikir pada penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: Kerangka Berpikir



Sumber : Peneliti, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian mempunyai peran penting guna meningkatkan pengetahuan, rasa ingin tahu yang berasal dari masalah yang timbul kemudian harus dirumuskan dan dibahas dengan cara mengamati, meneliti atau mencari suatu kebenaran secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah sesuai aturan yang berlaku (Sugiyono, 2017: 79)

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta Evaluasi Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Simanaere Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan di Desa Simanaere Botomuzoi masih terdapat masalah dalam pelaksanaan pada Program Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2 : Waktu Penelitian

No	Uraian	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024
1	Pengajuan Judul										
2	Bimbingan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Pelaksanaan Penelitian										
5	Seminar Hasil										
6	Perbaikan Skripsi										
7	Sidang										

Sumber ; Peneliti, 2024

3.3. Informan Penelitian

Pada penelitian ini penentuan informan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu dengan cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2002). Pemilihan Purposive sampling berdasarkan atas pertimbangan tertentu, dimana

pemilihan informan utama dalam penelitian ini dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau dalam penelitian ini paling tahu tentang program program Keluarga Berencana dan pemilihan informan triangulasi berdasarkan bahwa informan tersebut adalah pelaksana program serta informan yang sangat berdampak langsung terhadap program keluarga berencana.

Adapun kriteria informan peneliti adalah:

1. Informan Utama Informan utama adalah seseorang atau kelompok yang di jadikan sebagai sumber data pada penyampaian informasi terkait penelitian. Informan Utama dapat juga di artikan sebagai narasumber yang dapat memberikan gambaran permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun Informan utama dalam penelitian ini adalah Bidan Desa, Petugas KB dari puskesmas.
2. Informan Kunci Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan keseluruhan tentang permasalahan yang ada dalam penelitian. Informan kunci tidak hanya mengetahui tentang gambaran, tetapi mengetahui secara detail dan terperinci apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa.
3. Informan Tambahan Informan tambahan adalah individu ataupun kelompok yang menjadi isu sekunder dalam menyampaikan gambaran pendukung. Informan tambahan ini merupakan orang yang memberikan isu tambahan yang menjadi pelengkap dalam pembahasan penelitian. Adapun Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat sebanyak 6 orang, 3 orang pengguna KB dan 3 orang bukan pengguna KB.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Noor (2011:138) merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan dalam penelitian, karena hal ini bertujuan untuk mendapatkan data-data penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dari lapangan, observasi dilakukan dengan proses pengamatan terlebih dahulu kemudian mencatat data yang diperoleh secara logis, sistematis, objektif, dan rasional terhadap fenomena yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Teknik observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pancainderanya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan dengan melakukan pengamat sendiri, kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati itu Kristanto, (2018).

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Wawancara adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari penelitian, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden Yusuf, (2014:372). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Data yang

diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data melalui serangkaian pertanyaan dengan pihak Desa Simanaere Botomuzoi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada didapatkan dari informan-informan terkait permasalahan yang diteliti. Teknik dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dan menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang yang ada didalam suatu peristiwa, atau kejadian pada situasi sosial yang sangat berguna dalam melakukan penelitian kualitatif Yusuf, (2014:384).

3.5. Teknik Analisis Data

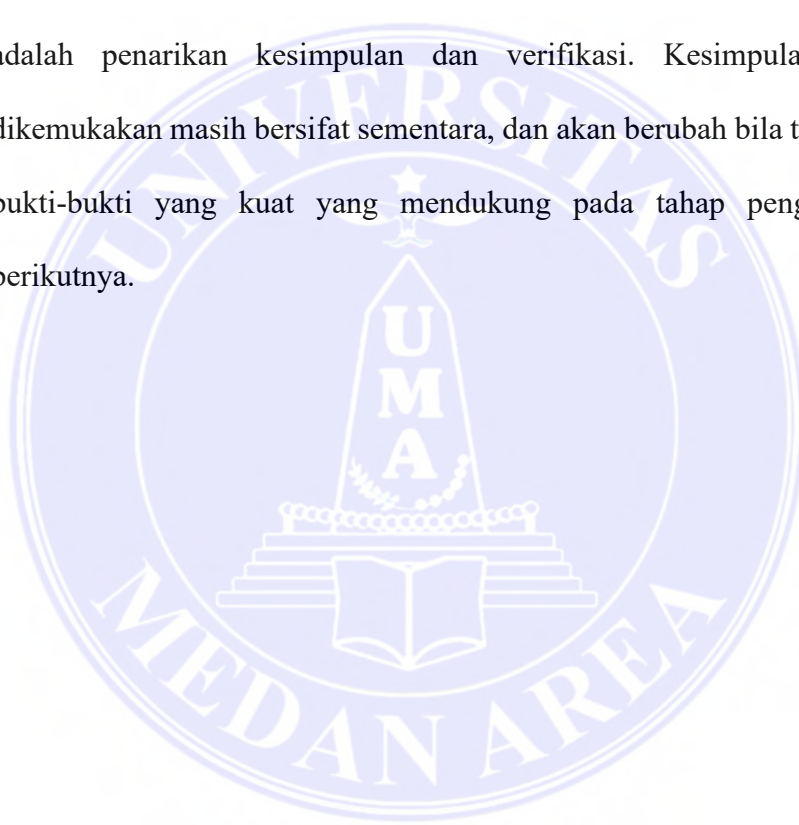
Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dalam data yang telah dikumpulkan. Data mentah yang diperoleh dari penelitian kemudian diolah dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuan akhirnya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis yang diajukan. Dengan kata lain, analisis data membantu peneliti untuk menemukan pola, tema, dan kategori dalam data sehingga menghasilkan temuan yang lebih jelas dan bermakna. Menurut Sugiyono (2013) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari.

Metode analisis data bertujuan untuk memastikan semua informasi yang didapat sesuai dan dapat dipercaya. Untuk memahami bagaimana program Keluarga Berencana di Desa Simanaere Botomuzoid berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk, peneliti menggunakan metode analisis data interaktif. Metode ini melibatkan wawancara mendalam dan pengamatan langsung terhadap para informan (misalnya petugas kesehatan). Data yang diperoleh dari Puskesmas kemudian dideskripsikan secara detail untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Berikut ini teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2014), yaitu:

1. Pengumpulan data, pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan indepth interview dan observasi, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu dengan indepth interview dan observasi.
2. Reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

3. Penyajian data setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Milles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif;
4. Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi Program Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, dapat disimpulkan bahwa secara umum program ini telah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam indikator dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Program KB di Desa Simanaere Botomuzoi menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB setiap tahunnya. Data dari bidan desa menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengguna alat kontrasepsi dari tahun 2020 hingga 2023. Selain itu, dukungan dari petugas kesehatan, PLKB, dan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam pencapaian efektivitas ini.

2. Kecukupan

Program KB telah memberikan kontribusi yang cukup dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kontrasepsi dan edukasi kesehatan

reproduksi. Akses terhadap berbagai jenis alat kontrasepsi tersedia secara rutin melalui puskesmas pembantu dan posyandu, serta kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader KB.

3. Pemerataan

Pemerataan dalam program Keluarga Berencana (KB) di Desa Simanaere Botomuzoi telah diupayakan secara maksimal melalui kerja sama antara bidan desa, kader posyandu, dan pemerintah desa. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode, termasuk undangan, pengumuman di rumah ibadah, dan kunjungan langsung ke rumah warga di daerah terpencil.

4. Ketepatan

Program KB di Desa Simanaere Botomuzoi dinilai tepat dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi masyarakat, yakni tingginya angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol. Pelaksanaan program telah diarahkan pada sasaran yang sesuai, yakni pasangan usia subur, dan telah menunjukkan hasil yang positif. Ketepatan strategi pelaksanaan serta dukungan regulasi dari pemerintah daerah menjadikan program KB sebagai salah satu instrumen kebijakan yang strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Meski program KB berjalan dengan cukup baik, namun pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat optimalisasi tujuan pengendalian pertumbuhan penduduk. Berikut kendanya :

1. Efisiensi

Pelaksanaan program KB di desa masih kurang efisien akibat keterbatasan fasilitas medis dan tenaga pelaksana, seperti minimnya peralatan dan kurangnya kader. Kondisi ini menghambat asesmen yang akurat, pemilihan kontrasepsi yang tepat, serta pemberian pelayanan. Untuk meningkatkan efisiensi program, diperlukan penambahan kader dan penyediaan fasilitas medis yang memadai.

2. Responsivitas

Masyarakat di desa Simanaere tergolong dengan masyarakat yang masih kuat terhadap budaya, serta memiliki pendidikan yang masih berpendidikan rendah. Hal ini menjadi faktor penyebab kurangnya respon masyarakat terhadap keluarga berencana. Di Desa Simanere, masih terdapat pandangan bahwa memiliki banyak anak adalah sebuah kebanggaan, cerminan dari status sosial, bahkan bentuk keberkahan.

5.2. SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa dan tenaga kesehatan perlu meningkatkan intensitas edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya KB, khususnya menyasar kelompok masyarakat yang masih terpengaruh budaya tradisional.

- b. Peningkatan aksesibilitas layanan KB melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pelatihan kader, serta memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah sulit dijangkau.
- c. Perlu adanya sinergi lintas sektor, antara pemerintah desa, puskesmas, dinas kesehatan, dan BKKBN untuk menjamin ketersediaan alat kontrasepsi serta keberlangsungan program KB.
- d. Mengintegrasikan program KB dengan pemberdayaan ekonomi keluarga, agar masyarakat tidak hanya melihat KB sebagai pengendalian jumlah anak, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas hidup.
- e. Mengembangkan pendekatan berbasis budaya lokal, sehingga program KB dapat lebih diterima tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2002. Metodologi penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dunn, William N. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama
- Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gaya Media, Yogyakarta.
- Marmi, dkk. 2016. Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir, Rozi. 1986. Teori–Teori Kependudukan. Jakarta : Bina Aksara
- Noor (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, edisi pertama, cetakan pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nugroho, Riant (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Todaro, M.P. (1995). Ekonomi untuk Negara Berkembang : Suatu Pengantar tentang Prinsip-prinsip, masalah kebijakan pembangunan ; Penerjemah, Agustinus Subekti, Edisi 3, cetakan 1, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses.
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.

JURNAL

- Andani, G. Y., & Putri, N. E. (2024). Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9999-10004.
- Biworo, A., Marlinae, L., Arifin, S., Khairiyati, L., Waskito, A., Rahmat, A. N., ... & Jinan, R. (2022). Evaluasi Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (Kkbpk) Di Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 7, No. 2).
- Hidayat, T., Kusuma, A. R., & Paselle, E. (2021). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 9(1).
- Larasati, Muda, I., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2019). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk The Role of the Office of Population and Family Planning Control in Controlling Population Growth. *Perspektif*, 8(1), 13–18.
- Purnawati, D., & Malik, M. F. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Tawangga, Kabupaten Konawe, Tahun 2024. *Jurnal Penelitian Sains dan Kesehatan Avicenna*, 3(3).
- Sukmahandika, Y., & Arsyad, R. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kampung Kb Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul (Doctoral dissertation, IPDN).

PERATURAN

- Peraturan Bupati Nias Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, serta Sistem Informasi Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang PER/04/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.



LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara

Berdasarkan Teori William Dunn

1. Efektivitas
 - a. Sejauh mana program keluarga berencana dalam mencapai tujuannya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi?
 - b. Apakah peserta KB terus meningkat atau menurun setiap tahun?
2. Efisiensi
 - a. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan program KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Desa Simanaere Botomuzoi?
 - b. Apakah dengan adanya program bantuan-bantuan dan penyuluhan memberikan tingkat keberhasilan program dengan baik?
3. Kecukupan
 - a. Sejauh mana Program KB dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal akses terhadap layanan kontrasepsi dan edukasi kesehatan reproduksi di Desa Simanaere Botomuzoi?
 - b. Apakah fasilitas seperti alat kontrasepsi dan obat yang diberikan mencukupi bagi masyarakat desa simanaere botomuzoi?
4. Pemerataan
 - a. Siapa yang menjadi sasaran sasaran program keluarga berencana di Desa Simanaere Botomuzoi?
 - b. bagaimana sistem pelaksanaan sosialisasi dan apakah sosialisai yang dilakukan merata bagi setiap masyarakat dusun di Desa Simnaere Botomuzoi?
5. Responsivitas
 - a. Bagaimana interaksi sosial atau respon masyarakat dengan adanya pelaksanaan program KB di desa simanaere botomuzoi dalam program keluarga berencana?
6. Ketepatan
 - a. Apakah program keluarga berencana sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku?
 - b. Bagaimana kontribusi program KB terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk

Lampiran II. Dokumentasi

1. Dokumentasi dengan Ibu Mawar Indah Tampubolon, Selaku Ibu PLKB kecamatan Botomuzoi



2. Dokumentasi dengan Ibu Herlina zebua Amd.Keb Selaku bidan Desa Simanaere Botomuzoi



3. Dokumentasi dengan Bapak Otoni Halawa Selaku Kepala Desa Simanaere Botomuzoi



4. Doumentasi dengan Ibu Mustika Mery Putri Lahagu, selaku masyarakat bukan pengguna KB



5. Dokumentasi dengan ibu Nursani Halawa, selaku masyarakat bukan pengguna KB



6. Dokementasi dengan ibu Atina Halawa, selaku masyarakat bukan pengguna KB



7. Dokumentasi dengan Ibu Muniman Lase, selaku masyarakat pengguna KB



8. Dokumentasi dengan Ibu Desnatal Lase Spd, selaku masyarakat pengguna KB



9. Dokumentasi dengan Ibu Esra Marselina Lase Spd, selaku masyarakat pengguna KB

